

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Zuhaily, Wahbah dan Nazariyyah Al-Darurah Al Syar'iyah Ma'a Al Qanun Al-Wad'i. "*Konsep Darurat dalam Hukum Islam*". Diterjemahkan oleh Said Agil Al- Munawar dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Andrisman, Tri. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010.
- Anwar, Hak Mochar. *Pra Peradilan*. Jakarta: Indhill Co, 1990.
- Aripin, Jaelani. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- As-Suwaidan, Thariq Muhammad. *Melahirkan Pemimpin Masa Depan Terjemahan. M. Habiburrahim*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Abdul Al-Qadir. "*At-Tasyri Al-Jinaty Al-Islamy Jilid I*". Beirut: Dar Al- Kitab Al-Arabi, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali, Al dan Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa*. Juz I. Beirut: Mu'assasah Ar-Risâlah, 1997.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid. I. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid. II. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

- Hartono. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progesif)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Hartono. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqahid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- M.P Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Moerad, Poentang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Barkti, 2007.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah arah ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Rosyadi, A. Rahmat dan M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid. 14. Terjemahan. Mudzakir*. Bandung: Al ma'ruf, 1987.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Shofie, Yusuf. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cet. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Simorangkir, J.C.T. Et.al. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1983.

Sofyan, Andi Muhammad dan Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014.

## **B. Peraturan dan Putusan**

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Kekuasaan KeHakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 2002.

\_\_\_\_\_. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Senjata Api. UU Nomor 12 Tahun 1951.

\_\_\_\_\_. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Nomor 9 Tahun 1976.

\_\_\_\_\_. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. PERKAP KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP Nomor 2 Tahun 2003.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 tahun 1981.

\_\_\_\_\_. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2003 tentang Hukum Acara Jinayat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014”

Pengadilan Negeri Sekayu, “Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Sky”.  
Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

## **C. Kamus**

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

## **D. Modul Kuliah**

Shofie, Yusuf. *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*. Jakarta: 1995.

**E. Internet**

Risalah Muslim. “Tafsir QS. Yusuf ayat 74”.  
<https://risalahmuslim.id/quran/yusuf/12-74/>, diakses pada tanggal  
13 Januari 2020.

Rumaysho. ‘Tidak Sengaja, Lupa, Dipaksa Berarti Tidak Terkena Dosa’.  
<https://rumaysho.com/25032-hadits-arbain-39-tidak-sengaja-lupa-dipaksa-berarti-tidak-terkena-dosa.html>, diakses pada tanggal 13  
Januari 2020.